

## REVITALISASI SISTEM SKS SEBAGAI STRATEGI PENGIMPLEMENTASIAN KBK DALAM PEMBELAJARAN, PELATIHAN, DAN PENGASUHAN DI AKPOL

Oleh: Wati Istanti, M.Pd.<sup>1</sup>

### Abstrak

Kurikulum berbasis kompetensi (KBK) di Akpol sudah dilaksanakan sebagai jawaban atas diberlakukannya Kepmendiknas Nomor 232/U/2000 yang menandai perubahan paradigma pendidikan tinggi dari pendidikan berbasis keilmuan (konten) menjadi pendidikan berbasis kompetensi. Penerapan KBK dengan sistem *boarding school* yang diimplementasikan dalam bentuk kegiatan pembelajaran, pelatihan, dan pengasuhan ideal sebagai upaya pembentukan karakter taruna. Pelaksanaan pembelajaran, pelatihan, dan pengasuhan tersebut dilaksanakan dengan sistem kredit semester (SKS) sebagaimana ketentuan yang berlaku. Persoalannya adalah sudahkan KBK terimplementasikan secara tepat sesuai dengan ketentuan sistem kredit semester (SKS) di Akpol? Tulisan ini berupaya mengungkapkan gagasan konseptual tentang bagaimana mengintegrasikan program pembelajaran, pelatihan, dan pengasuhan dengan merevitalisasi sistem SKS sebagai bentuk implementasi KBK di Akpol. Perlu kerjasama yang harmonis antara dosen/gadik, instruktur, dan pengasuh dalam mengintegrasikan pelaksanaan pembelajaran, pelatihan, dan pengasuhan dengan sistem SKS agar KBK dapat diimplementasikan secara maksimal.

Kata kunci: revitalisasi, KBK, SKS, integrasi, pembelajaran, pelatihan, dan pengasuhan

### A. PENDAHULUAN

Perubahan paradigma pendidikan di Akademi Kepolisian (Akpol) ditandai dengan penggunaan kurikulum berbasis kompetensi menggantikan kurikulum berbasis konten telah berlangsung lama. Perubahan paradigma tersebut sebagai tuntutan pendidikan tinggi abad XXI, yang mendudukkan pendidikan tinggi sebagai lembaga pembelajaran, sumber pengetahuan, dan sebagai tempat pengembangan budaya dan pembelajaran terbuka untuk masyarakat. Dalam rangka mengembangkan

pendidikan tinggi yang hasil didiknya dapat berkompetisi secara global, Ditjen Dikti, Depdiknas, mengembangkan kurikulum yang *in line* dengan visi dan aksi pendidikan tinggi UNESCO yang kemudian dikonfirmasi dalam *The World Conference on Education for All* di Thailand Tahun 1999. Asas pengembangan pendidikan tinggi berupa empat pilar pendidikan (*learning to know, learning to do, learning to live together, dan learning to be*) dan belajar sepanjang hayat.

Akpol sebagai lembaga pendidikan

1) Wati Istanti, M.Pd.. adalah dosen pada Universitas Negeri Semarang

an tinggi tentu saja memiliki sistem untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas. Sistem pendidikan tinggi jika dilihat sebagai sebuah proses akan memiliki empat tahapan pokok yaitu (1) masukan; (2) proses; (3) luaran; dan (4) hasil ikutan (*outcome*). Yang termasuk dalam kategori masukan antara lain adalah dosen, mahasiswa, buku, staf administrasi dan teknisi, sarana dan prasarana, dana, dokumen kurikulum, dan lingkungan. Yang masuk dalam katagori proses adalah proses pembelajaran, proses penelitian, proses manajemen. Yang dikatagorikan luaran adalah lulusan, hasil penelitian dan karya IPTEKS lainnya, sedang yang termasuk dalam katagori hasil ikutan (*outcome*) antara lain adalah penerimaan dan pengakuan masyarakat terhadap luaran perguruan tinggi, kesinambungan, peningkatan mutu hidup masyarakat dan lingkungan.

Sejak diberlakukannya Kepmendiknas Nomor 232/U/2000 yang menandai perubahan paradigma pendidikan tinggi dari pendidikan berbasis keilmuan (konten) menjadi pendidikan berbasis kompetensi, banyak yang harus direnungkan kembali. Merosotnya kualitas lulusan perguruan tinggi, khususnya perguruan tinggi umum yang memberikan sumbangan terhadap banyaknya pengangguran terdidik di

Indonesia menunjukkan bahwa pendidikan di perguruan tinggi belum benar-benar sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja. Pada umumnya lulusan perguruan tinggi belum bisa diserap dalam dunia kerja karena pada umumnya kompetensinya masih belum memadai (Adiwijaya 2009).

Dalam konteks pendidikan kedinasan seperti Akpol, tentu persoalannya bukan pada lulusan Akpol terserap oleh dunia kerja atau tidak tetapi lebih pada seberapa kompetenkah para lulusan Akpol menjalankan tugas dan profesinya. Apakah lulusan Akpol telah menunjukkan kompetensinya sebagai pimpinan Polri masa depan yang memenuhi kriteria: (a) Sebagai Abdi Negara dan masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Mahaesa, arif, profesional, patuh hukum, bersikap/ berperilaku terpuji dalam kehidupan bermasyarakat, (b) Menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, dan kejujuran sesuai dengan etika profesi kepolisian, (c) Mahir dalam melaksanakan tugas-tugas Kepolisian secara proporsional, (d) Memiliki kemampuan melaksanakan tugas-tugas dan fungsi kepolisian di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, serta penegak hukum, (e) Mampu me-

mangku jabatan pada organisasi kepolisian di lini terdepan.

Hanya sedikit perguruan tinggi yang mengerti betapa penting lulusan yang kompeten di dunia kerja, termasuk perguruan tinggi negeri dan kedinas-an seperti Akpol. Ada tiga hal penting yang harus diperhatikan dalam budaya akademik modern. Pertama, kurikulum program studi harus berbasis kompetensi dan silabus dari kurikulum tersebut harus terus dikaji apakah sudah sesuai dengan ke-butuhan dunia kerja atau belum. Kedua, proses pembelajaran yang terkendali. Ketiga, standar output yang terjamin. Kurikulum berbasis kompetensi tidak bisa ditelorkan oleh seorang pakar, tetapi harus melalui proses workshop bersama, baik dari kalangan akademisi maupun dari kalangan user. Workshop ini harus dapat mengawinkan dunia akademis dengan dunia kerja dan menelorkan kurikulum dan silabus berbasis kompetensi. Kurikulum tersebut harus terus dievaluasi karena fenomena terus berkembang.

Kurikulum akan menjadi "menu makanan" taruna sedangkan kandungan gizinya bergantung pada muatan silabus yang diberikan oleh dosen/gadik pengampu. Oleh karena itu, kajian-kajian mata kuliah keahlian, harus terus dilokakaryakan, baik oleh pakar akademik maupun

praktisi yang membidangnya agar apa yang diberikan kepada taruna adalah sesuatu yang benar-benar dibutuhkan oleh taruna di lapangan kerja. Program kerja ini sangat penting di perguruan tinggi. Lulusan pendidikan tinggi tidak boleh lagi memiliki kompetensi yang setengah-setengah dan tidak jelas di mata *user*.

Perencanaan akademik yang berbasis kompetensi saja tidak cukup, tetapi harus dibarengi dengan pengendalian proses pembelajaran. Dosen/gadik perlu melakukan kontrak pembelajaran dengan ketua program studi/departemen dan ketua program studi/departemen berhak mengevaluasi kontrak pembelajaran yang diprogramkan oleh dosen/gadik dengan tarunanya. Program studi harus menjadi ujung tombak kualitas lulusan.

Keppmendiknas Nomor 232/ U/ 2000 itu mengatur tentang pedoman penyelenggaraan pendidikan tinggi yang berbasis kompetensi dan evaluasi pembelajarannya. Pada prinsipnya, kurikulum pendidikan berbasis kompetensi itu mengubah kurikulum *knowledge based* (berbasis pengetahuan) menjadi berbasis kompetensi. Kurikulum berbasis pengetahuan sejauh ini tidak efektif untuk mencetak sumber daya manusia yang terampil di bidang masing-masing. Sebab, kurikulum tersebut hanya sebatas memberikan penge-

tahuan, tanpa diimbangi kemampuan mengaplikasikan pengetahuan tersebut.

Akademi Kepolisian sebagai perguruan tinggi kedinasan sudah sejak lama menerapkan kurikulum berbasis kompetensi dengan sistem pendidikan berasrama (*boarding school*). Penerapan kurikulum berbasis kompetensi dengan sistem *boarding school* dapat dikatakan tepat untuk pembentukan para calon perwira polisi karena selain melaksanakan program pembelajaran dan pelatihan, juga diiringi dengan program pengasuhan selama 24 jam penuh sebagai upaya pembentukan karakter taruna.

Penerapan kurikulum berbasis kompetensi diperguruan tinggi, termasuk di Akpol, menggunakan sistem kredit semester (SKS). Satuan kredit semester dimakna sebagai besarnya beban studi mahasiswa/taruna, besarnya pengakuan hasil usaha mahasiswa/taruna, besarnya pengakuan atas usaha komulatif suatu program tertentu, serta besarnya usaha untuk menyelenggarakan pendidikan bagi perguruan tinggi khususnya bagi pengajar/dosen. Sistem SKS tidak hanya mengikat dan mengatur beban belajar mahasiswa/ratuna, tetapi juga mengikat besarnya usaha pengajar/ dosen, serta besarnya usaha penyelenggaraan program bagi pimpinan dan staf

pengelola perguruan tinggi.

Yang menjadi permasalahan saat ini adalah (1) apakah program pembelajaran, pelatihan, dan pengasuhan di Akpol telah benar-benar berbasis kompetensi? (2) Apakah penyelenggaraan pembelajaran, pelatihan, dan pengasuhan di Akpol telah benar-benar menerapkan sistem SKS secara murni dan konsekuen? Untuk menjawab permasalahan tersebut, berikut akan dikupas apa dan bagaimana kurikulum berbasis kompetensi di perguruan tinggi dan bagaimana implementasinya dalam pembelajaran, pelatihan, dan pengasuhan di Akpol. Selain itu, juga akan dikupas bagaimana seharusnya penerapan sistem SKS yang ideal dalam pembelajaran, pelatihan, dan pengasuhan di Akpol.

## B. HAKIKAT KURIKULUM BERBASIS KOMPETENSI

Nasution (2006:1) menjelaskan istilah kurikulum berarti "1. a *race course*; a *place for running*; a *chariot*, 2. a *course of study in a university*". Kurikulum diartikan sebagai jarak yang harus ditempuh oleh pelari atau kereta dalam perlombaan dari awal sampai akhir, kurikulum juga berarti *chariot* semacam kereta pacu pada zaman dulu yang membawa seseorang dari start sampai finish. Kamus webster juga memberikan penjelasan bahwa kurikulum yang digunakan

dalam pendidikan didefinisikan sebagai sejumlah mata pelajaran di sekolah atau mata kuliah di perguruan tinggi yang harus ditempuh untuk mencapai suatu ijazah atau tingkat, kurikulum juga berarti keseluruhan pembelajaran yang disajikan oleh suatu lembaga pendidikan. Tyler (1949) mengemukakan empat konsep penting kurikulum dengan melontarkan empat pertanyaan sentral yang meminta jawaban secara rasional bagi perencanaan kurikulum ialah (1) apa tujuan yang harus dicapai oleh lembaga pendidikan? (2) apa pengalaman-pengalaman belajar yang dapat disediakan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut? (3) bagaimana mengorganisasikan pengalaman-pengalaman tersebut? (4) bagaimana kita dapat memutuskan apakah tujuan-tujuan tersebut tercapai!

Empat pertanyaan pokok yang dikemukakan oleh Taylor mengidentifikasi empat hal penting dalam konsep kurikulum yaitu tujuan, pengalaman belajar, organisasi, dan evaluasi. Siraj (2008:1) menyatakan "kurikulum adalah kursus yang dijalankan (*course of action*)" yang mencakup seluruh pengalaman yang diperoleh oleh setiap individu pelajar dalam suatu program pendidikan yang bertujuan untuk mencapai sasaran yang lebih luas serta tujuan-tujuan tertentu yang telah dirancang.

Secara rinci Siraj menjelaskan lebih lanjut bahwa kurikulum adalah (1) suatu prarancangan (2) rancangan yang mengandung tujuan, teori, dan tekanan-tekanan mengenai tekanan sosial, perkembangan manusia, pembelajaran dan ilmu pengetahuan serta kognitif yang semuanya menjadi panduan kepada prarancangan di semua tingkat (3) rancangan pengajaran oleh guru (4) pengalaman belajar bagi siswa (5) merupakan program pendidikan.

Dalam pandangan Kelly (2004) "kurikulum adalah perencanaan pembelajaran yang praktis, efektif dan produktif, menawarkan banyak konten pengetahuan atau mata pelajaran yang diajarkan, transmisi, atau, berikan". Nasution (2006:9) mengidentifikasikan kurikulum dalam empat segi yakni kurikulum dapat dilihat sebagai produk, kurikulum dapat dipandang sebagai program, kurikulum dipandang sebagai hal-hal yang diharapkan akan dipelajari dan kurikulum sebagai pengalaman. Sementara, Sukmadinata (2004,27) menekankan kurikulum pada tiga konsep penting yaitu (1) kurikulum sebagai substansi (2) kurikulum sebagai sistem (3) kurikulum sebagai bidang studi.

Defenisi yang dikemukakan oleh ahli-ahli di atas secara substantif tidaklah bertentangan dan memiliki kesamaan yang memandang (1)

kurikulum sebagai perencanaan belajar yang berisikan tujuan pendidikan (2) kurikulum sebagai pengalaman belajar yang diberikan kepada siswa/mahasiswa (3) kurikulum sebagai dokumen tertulis yang berisikan kumpulan bahan ajar dan sejumlah mata pelajaran untuk diberikan kepada siswa/mahasiswa. Pengembangan kurikulum tidak akan pernah beranjak dari substansi dasar kurikulum itu sendiri dalam tataran rencana, pengalaman belajar yang terdokumentasi dengan baik. Dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003 juga disebutkan bahwa “kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu”.

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 dan Nomor 045/U/2002 mengamanatkan agar penyusunan kurikulum pendidikan tinggi yang berbasis kompetensi dilakukan oleh setiap program studi di kalangan perguruan tinggi yang bersangkutan (bukan oleh pemerintah). Jadi PT diberi otonomi/kewenangan dalam menentukan kurikulum program studi yang diselenggarakannya. Kurikulum tidak lagi ditetapkan oleh pemerintah.

Dalam Kepmendidnas No.045/U/2002 kompetensi diartikan sebagai “seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggungjawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu”. Kompetensi dapat pula diartikan sebagai ciri-ciri pengetahuan, keterampilan dan kepribadian yang diperlukan untuk mencapai performansi (kinerja) yang tinggi. Pendidikan harus menghasilkan kemampuan bertindak yang benar & cerdas; tindakan yang produktif, yang efektif, yang mampu memecahkan masalah nyata dalam kehidupan. Menguasai pengetahuan tidak sama dengan memiliki kompetensi. Kompetensi berkaitan dengan kemampuan bertindak yang cerdas.

Berdasarkan definisi kompetensi di atas, komponen-komponen atau karakteristik yang membentuk sebuah kompetensi menurut Spencer & Spencer dalam [bkn.go.id](http://bkn.go.id) adalah *motives, traits, self concept, knowledge, dan skills*. *Motives* yaitu konsistensi berpikir mengenai sesuatu yang diinginkan atau dikehendaki oleh seseorang, sehingga menyebabkan suatu kejadian. Motif tingkah laku seperti mengendalikan, mengarahkan, membimbing, memilih untuk menghadapi kejadian atau tujuan tertentu. *Traits* yaitu

karakteristik fisik dan tanggapan yang konsisten terhadap informasi atau situasi tertentu. *Self Concept* yaitu sikap, nilai, atau imajinasi seseorang. *Knowledge* yaitu informasi seseorang dalam lingkup tertentu. Komponen kompetensi ini sangat kompleks. Nilai dari *knowledge test*, sering gagal untuk memprediksi kinerja karena terjadi kegagalan dalam mengukur pengetahuan dan kemampuan sesungguhnya yang diperlakukan dalam pekerjaan. *Skills* yaitu kemampuan untuk mengerjakan tugas-tugas fisik atau mental tertentu. *Competency* merupakan kombinasi dari keterampilan (*skill*), pengetahuan (*knowledge*), dan perilaku (*attitude*) yang dapat diamati dan diterapkan secara kritis untuk suksesnya sebuah organisasi dan prestasi kerja serta kontribusi pribadi karyawan terhadap organisasinya.

Pendidikan tidak sekadar mengajarkan dan mempelajari pengetahuan, tetapi juga keterampilan dan aspek-aspek kepribadian lain. Pendidikan tidak untuk sekadar menjadi tahu, tetapi untuk menjadi mampu bertindak cerdas. (Memecahkan masalah nyata dalam kehidupan). Dalam ilmu pendidikan dikenal adanya 3 kawasan tujuan pendidikan yang perlu dicapai melalui kegiatan belajar/pendidikan, yaitu: *cognitive*, *psycho-motoric* dan

*affective*. Pendidikan yang baik adalah yang mencakup ketiga kawasan tujuan itu, yang menjamin dikuasainya kemampuan bertindak cerdas, dan bukan sekadar mengetahui (*cognitive*).

UNESCO merumuskan adanya empat pilar utama pendidikan, yaitu: *Learning to know* (Belajar untuk mengetahui); *Learning to do* (Belajar untuk dapat melakukan); *Learning to be* (Belajar memerankan); *Learning to live together* (Belajar hidup bersama, berinteraksi, bekerjasama). Keempatnya harus dapat dicapai melalui setiap pendidikan/program studi, baik dalam program pembelajaran, pelatihan, maupun pengasuhan.

Kepmendiknas tersebut di atas bertolak dari adanya kritik masyarakat luas bahwa pendidikan kita umumnya baru mengajarkan pengetahuan (teori), belum mengajarkan kemampuan dan mengembangkan kompetensi dalam arti sebenarnya. Agar bisa mendapat tempat yang terhormat di masyarakat, PT harus berusaha keras agar mampu membekali mahasiswanya dengan kompetensi-kompetensi yang relevan untuk setiap program studi yang diselenggarakan. Selama ini barangkali yang banyak dibekalkan adalah pengetahuan (ilmu, teori, teknologi, filosofi, dsb) dan kurang aspek yang lain. Dan karena itu belum mampu

menumbuhkan kemampuan bertindak atau kompetensi tertentu. Pembaharuan kurikulum ini harus dilakukan sendiri oleh kalangan PT, dan pelaksanaan kurikulumnya dilakukan oleh dosen-dosen yang bersangkutan. Karena itu, sebaiknya semua dosen perlu dilibatkan dalam perombakan kurikulum ini sebuah perguruan tinggi.

Kemungkinan besar sesudah perombakan kurikulum ini perlu ditinjau kembali kemampuan-kemampuan dosen, terutama dalam hal "to do" dan "to be". Peningkatan kemampuan dosen dalam hal-hal itu menjadi persyaratan penting. Bagaimana mungkin seorang dosen mengajarkan suatu kemampuan kalau dia sendiri tidak menguasai kemampuan itu. Inipun barangkali merupakan tantangan baru bagi pendidikan tinggi Indonesia, yaitu mengajarkan kemampuan bertindak atau kompetensi. Sebelumnya hanya sekedar mengajarkan pengetahuan, teori, rumus, prinsip, dan bukan kompetensi. Bahkan mungkin kurang mengajarkan bagaimana menggunakan pengetahuan dan teori-teori tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Sesuai Kepmendiknas No.045/U/2002 maka kompetensi yang dimiliki oleh setiap sarjana terdiri atas (a) kompetensi utama, (b) kompetensi pendukung, (c) kompe-

tensi lain yang bersifat khusus dan gayut dengan kompetensi utama. Setiap kompetensi di atas memiliki elemen-elemen yang terdiri atas (a) landasan kepribadian, (b) penguasaan ilmu dan keterampilan, (c) kemampuan berkarya, (d) sikap dan perilaku dalam berkarya, (e) pemahaman kaidah kehidupan bermasyarakat. Kepribadian merupakan sifat-sifat umum yang telah berhasil dikembangkan pada diri seseorang, seperti teliti, rapi, rajin, disiplin, cermat, sikap mental, minat, dsb. Pengetahuan & keterampilan merupakan jenis/substansi pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan. Keahlian berkarya merupakan kemampuan yang dikuasai dengan sangat tinggi, dapat diandalkan, profesional. Perilaku berkarya merupakan sifat perilaku yang mendukung dalam berkarya, seperti produktif, efisien, efektif, dan jujur. Kehidupan bermasyarakat merupakan kemampuan kerja-sama dan pendekatan pada orang lain; dapat menerima keragaman dalam kehidupan bermasyarakat.

Komponen kurikulum adalah unsur-unsur penting yang harus dimiliki oleh kurikulum yang merupakan kesatuan sistem dan tidak terpisah satu dengan yang lainnya dan saling melengkapi. Komponen-komponen tersebut adalah tujuan, isi, aktivitas belajar, dan evaluasi.



Komponen tujuan merupakan arah akan dicapai bersama. Tujuan akan membimbing dan mengarahkan setiap langkah dan tindakan agar selalu berada dalam jalur yang benar dan tidak menyimpang. Zais (1976) dan diperkuat oleh Print (1993) membagi tujuan kurikulum menjadi tiga macam yaitu *aims*, *goals*, dan *objectives*. *Aims* adalah pernyataan tujuan kurikulum pada level tingkat nasional, sehingga dinyatakan sebagai tujuan kurikulum dari tujuan pendidikan nasional. *Goals* adalah kurikulum dari tujuan institusional lebih mengarah pada hasil yang akan dicapai oleh lembaga, yang menunjukkan sebuah gambaran yang spesifik dari sebuah lembaga pendidikan, dan merupakan bagian dari sistem sekolah. *Objectives* adalah tujuan yang berada pada tataran instruksional yang terlihat dalam setiap materi dan pokok bahasanya

Isi kurikulum adalah muatan-muatan yang dikandung dalam kurikulum yang tidak hanya berisikan satu atau dua muatan akan tetapi memiliki multikonten di dalamnya. Brady (1992:102) menegaskan bahwa isi kurikulum dapat didefinisikan pada dua hal penting yaitu isi kurikulum dapat dimaknai sebagai mata pelajaran dalam proses belajar mengajar yang termasuk di dalamnya beberapa informasi fak-

tual, pengetahuan, keahlian, konsep, sikap dan nilai. Kedua, isi kurikulum adalah sesuatu yang penting dalam proses belajar mengajar dimana dua elemen pokok kurikulum yang termuat di dalamnya adalah isi dan metode dalam interaksi yang tetap. Zais (1976:324) menyatakan bahwa isi kurikulum biasanya terdiri atas tiga elemen yaitu pengetahuan, proses dan nilai.

Kegiatan utama bahkan jantungnya kurikulum ada pada aktivitas belajar yang direkayasa sedemikian rupa sehingga isi kurikulum yang disusun serta tujuan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan baik. Aktivitas belajar sering juga diistilahkan dengan proses belajar-mengajar. Dalam melaksanakan proses belajar-mengajar akan melibatkan banyak unsur baik mahasiswa, dosen, media yang dipergunakan, pilihan metode, strategi, pendekatan, penciptaan lingkungan belajar yang dinamis, pengaturan dan pengelolaan kelas dan lain sebagainya. Zais menyatakan bahwa aktivitas belajar adalah jantungnya kurikulum karena akan berpengaruh terhadap pembentukan pengalaman belajar pada mahasiswa.

Evaluasi adalah tahapan penting sekaligus sebagai unsur utama dalam kurikulum yang akan memberikan informasi tentang keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kurikulum.

Untuk mengetahuinya cukup dengan membandingkan antara tujuan dengan hasil, apabila hasil memperlihatkan ketercapaian tujuan maka dapat dikatakan kurikulum yang telah direncanakan dan dilaksanakan berhasil dijalankan. Evaluasi berisikan informasi yang menggambarkan secara keseluruhan kinerja dalam proses belajar mengajar. Menurut Print (1993:187) "Evaluasi adalah sumber informasi bagi stakeholders pendidikan untuk mengetahui pencapaian kinerja dalam proses belajar mengajar sekaligus menentukan kebijakan pendidikan maupun keputusan dalam pengembangan kurikulum pada periode selanjutnya".

### C. STRATEGI PENGIMPLEMENTASIAN KURIKULUM BERBASIS KOMPETENSI

Implementasi dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Artinya yang dilaksanakan dan diterapkan adalah kurikulum yang telah dirancang/didesain untuk kemudian dijalankan sepenuhnya. Implementasi kurikulum dituntut untuk melaksanakan sepenuhnya apa yang telah direncanakan dalam kurikulum untuk dijalankan dengan segenap hati dan keinginan kuat. Rancangan kurikulum dan implementasi kurikulum adalah sebuah

sistem dan membentuk sebuah garis lurus dalam arti implementasi mencerminkan rancangan, maka penting sekali pemahaman dosen serta aktor lapangan lain yang terlibat dalam proses belajar-mengajar sebagai inti kurikulum untuk memahami perancangan kurikulum dengan baik dan benar.

Fullan (1982) dalam Miller and Seller (1985:246) mengemukakan definisi tentang implementasi yaitu: "suatu proses peletakan ke dalam praktik tentang suatu ide, program atau seperangkat aktivitas baru dalam mencapai atau mengharapkan suatu perubahan." Laithwood (1982) juga masih dalam Miller and Seller (1985:246) mengatakan bahwa: "Implementasi sebagai proses, implementasi meliputi pengurangan perbedaan antara kenyataan praktik dan harapan praktis oleh suatu inovasi." Rozali (2008) menyatakan bahwa: "tujuan kurikulum tidak untuk memetakan karsa dan karya tenaga pengajar, tetapi sebaliknya tenaga pengajar itu dipandang sebagai orang yang memperlihatkan kreasi dan adaptasinya dalam menerapkan kurikulum". Rozali (2008:27) menyatakan implementasi kurikulum merupakan suatu proses penerapan ide, konsep, kebijakan atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan penge-

tahuan, keterampilan, maupun nilai dan sikap. Implementasi kurikulum menurut Hasan (2004:11) adalah “usaha merealisasikan ide, konsep, dan nilai-nilai yang terkandung dalam kurikulum menjadi kenyataan”.

Wujud nyata dari implementasi kurikulum adalah aktivitas belajar mengajar di kelas, dengan kata lain aktivitas belajar mengajar di kelas merupakan operasionalisasi dari kurikulum. Selanjutnya Saylor dan Alexander dalam Miller dan Seller (1985) memandang proses pembelajaran sebagai implementasi: “pembelajaran merupakan ... implementasi dari rencana kurikulum, biasanya tidak harus melibatkan pembelajaran dalam arti interaksi antara dosen dan mahasiswa dalam suatu lingkungan sekolah”. Hamalik (2006:123) mengemukakan bahwa implementasi adalah operasionalisasi konsep kurikulum yang masih bersifat tertulis menjadi aktual ke dalam kegiatan pembelajaran. Lebih jauh Print (1993:217-218) menjelaskan bahwa dalam implementasi kurikulum semestinya perlu diberi peluang untuk dilakukan beberapa modifikasi, sebab sangat mungkin terjadi perbedaan antara rancangan dengan faktor-faktor yang bersifat lokal dan kontekstual, seperti perbedaan individual siswa, sekolah, pengajar, keadaan orang tua serta dukungan

masyarakat. Implementasi kurikulum bukan sekadar melaksanakan atau tidak melaksanakan inovasi, melainkan suatu proses yang berkembang dan terjadi dalam berbagai tingkat dan derajat.

Dari definisi yang telah dikemukakan di atas maka implementasi kurikulum dapat dimaknai sebagai berikut: Pertama, implementasi sebagai aktualisasi rencana atau konsep kurikulum, Kedua, implementasi kurikulum sebagai proses pembelajaran, Ketiga, implementasi kurikulum sebagai realisasi ide, nilai, dan konsep kurikulum, Keempat, implementasi kurikulum sebagai proses perubahan perilaku peserta didik. Dari empat konsep utama tentang implementasi kurikulum ini pada hakikatnya dapat dipahami bahwa implementasi kurikulum akan terlihat secara jelas dan nyata dalam proses belajar mengajar itu sendiri sehingga secara langsung dapat juga dikatakan proses belajar-mengajar yang sedang dijalankan itulah sebagai implementasi kurikulum.

Jackson dalam Hamalik (2006:8-9) menjelaskan ada tiga pendekatan dalam implementasi kurikulum yaitu: *Fidelity Perspective*, *Mutual Adaptation*, dan *Enactment Curriculum*. Karakteristik utama pendekatan *Fidelity Perspective* ialah pelaksanaan kurikulum di sekolah berupaya mengimplementasikan kurikulum

sesuai dengan desain yang telah ditetapkan secara standar. Pendekatan *Mutual Adaptation* memiliki ciri pokok dalam implementasinya adalah pelaksana mengadakan penyesuaian-penyesuaian berdasarkan kondisi riil, kebutuhan dan tuntutan perkembangan secara kontekstual. Pendekatan ini memiliki asumsi bahwa berdasarkan temuan empirik, pada kenyataannya kurikulum tidak pernah benar-benar dapat diimplementasikan sesuai rencana, akan tetapi perlu disesuaikan dengan kebutuhan setempat. Menurut pendekatan ini, desain dan isi kurikulum dirancang di luar konteks pembelajaran, kemudian diadaptasikan oleh guru sebagai sebuah pengembangan kurikulum secara lokal dan adaptasi ini juga dapat dilakukan selama proses implementasi berlangsung. Pendekatan *Enactment Curriculum* memandang bahwa pelaksana kurikulum melakukan berbagai upaya untuk mengoptimalkan pelaksanaan kurikulum. Rencana program (kurikulum) bukan merupakan produk atau peristiwa (pengembangan) melainkan sebagai proses yang berkembang. Perencanaan program dilakukan di luar (eksternal), dan merupakan sumber bagi guru untuk menciptakan kurikulum sebenarnya yang diterapkan dalam pembelajaran. Para guru menggunakan rencana kurikulum ekster-

nal sebagai acuan agar kurikulum dapat diterapkan lebih baik dan bermakna baik bagi guru maupun bagi siswa. Para guru adalah kreator dalam implementasi kurikulum.

Terdapat beberapa model implementasi kurikulum, sebagaimana yang disampaikan oleh Miller dan Seller (1985:249-250), yaitu: *The Concerns Based Adaptation Model (CBAM)*, *TORI Model*, *Grass-root Model*, dan *The Profile Inovate Model*. Inti dari model *CBAM* adalah menggambarkan, mengidentifikasi beberapa tingkat perhatian atau kepedulian guru tentang suatu inovasi dan bagaimana guru menggunakan inovasi di dalam kelas. *CBAM* mengemukakan dua definisi untuk menguraikan perubahan yaitu: (a) *Stage of Concern about the Innovation (SoC)*, dengan menguraikan perasaan guru dalam proses perubahan, (b) *Level of Use the Innovation (LoU)* dengan menguraikan penampilan guru dalam menggunakan sebuah program baru. Model ini dikembangkan oleh Hall dan Louck.

*TORI Model* ini dikembangkan oleh Gibb dengan fokus utama pada perubahan personal atau pribadi dan perubahan sosial. Model ini menyediakan suatu skala yang membantu guru mengidentifikasi bagaimana lingkungan akan menerima ide-ide baru sebagai harapan untuk mengimplementasikan inovasi dalam praktik

dan menyediakan beberapa petunjuk untuk menyediakan perubahan.

Grass-root Model ini diawali dari keresahan guru tentang kurikulum yang berlaku, selanjutnya mereka memiliki keinginan untuk memperbaharui atau menyempurnakannya. Tugas para administrator dalam pengembangan model ini tidak lagi berperan sebagai pengendali pengembangan akan tetapi sebagai motivator, dan fasilitator. Perubahan atau penyempurnaan kurikulum bisa dimulai dari guru-guru secara individual atau bisa oleh kelompok guru. Model ini hanya mungkin dapat dilakukan, apabila guru-guru di sekolah memiliki kemampuan serta sikap profesional yang tinggi dan memahami akan seluk beluk-beluk pendidikan.

*The Profile Inovate Model* dikembangkan oleh Lethwood. Model ini difokuskan terutama pada para guru. Model ini membolehkan para guru dan pengelola kurikulum mengembangkan profil yang merupakan hambatan untuk perubahan, juga bagaimana para guru dapat mengatasi hambatan. Model Lethwood ini tidak hanya menggambarkan tetapi juga menyediakan cara bagi para guru dengan strategi dalam mengatasi hambatan atau masalah pada tataran implementasi.

Implementasi kurikulum berbasis kompetensi akan bermuara pada

pembelajaran itu sendiri, sehingga untuk melihat implementasi tersebut di lapangan adalah dengan memperhatikan pelaksanaan proses belajar mengajar atau kegiatan pembelajarannya yang intinya bagaimana pesan dan isi kurikulum itu dapat tersampaikan kepada peserta didik secara optimal. Mulyasa (2008:181) menyatakan pelaksanaan pembelajaran sebagai implementasi KBK mencakup tiga hal yaitu pembukaan, pembentukan kompetensi dan penutup, sementara Sanjaya (2007:202) menegaskan bahwa pembelajaran sebagai implementasi kurikulum adalah sebuah sistem di mana masing-masing komponen dalam sistem pembelajaran itu saling terkait dan akan selalu berinteraksi untuk mencapai tujuan yang diharapkan, sebagai sebuah sistem dalam konteks implementasi maka komponen yang saling mendukung serta terkait satu dengan yang lain terdiri atas tujuan, materi, metode, media, dan evaluasi.

Hasan (1984:12), mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kurikulum adalah " karakteristik kurikulum, strategi implementasi, karakteristik penilaian, pengetahuan tenaga pengajar tentang kurikulum, sikap terhadap kurikulum dan keterampilan mengarahkan". Terdapat lima elemen yang mempengaruhi implementasi kurikulum, yaitu: dukungan

dari pimpinan lembaga, dukungan dari rekan sejawat tenaga pengajar, dukungan dari mahasiswa, dukungan dari orang tua, dan dukungan dari dalam diri tenaga pengajar". Menurut Laithwood dalam Miller and Seller (1985:246) "implementasi sebagai proses. Implementasi meliputi pengurangan perbedaan antara kenyataan praktik dan harapan praktis oleh suatu inovasi". Implementasi adalah proses perubahan perilaku dalam petunjuk anjuran oleh inovasi terjadi dalam tahapan, setiap waktu dan mengatasi halangan dalam perkembangannya.

Faktor-faktor yang menjadi kunci dalam proses implementasi berdasarkan karakteristik lokal (*local characteristics*) yaitu: *school district* (lingkungan sekolah), berkaitan dengan kondisi sekolah, fasilitas, dan sarana pendukung yang memadai. *Community* (masyarakat), dukungan masyarakat sekitar, kerjasama dengan dunia usaha dan industri. *Principal* (kepala sekolah), berkaitan dengan manajemen dan kepemimpinan kepala lembaga. *Teacher* (guru/dosen), adanya respon, dukungan, partisipasi guru/dosen dalam pelaksanaan kurikulum. *External factors* (faktor eksternal), dukungan dari pemerintah (administrator pendidikan), swasta.

#### D. SISTEM SKS DAN PENGIMPLEMENTASIANNYA

Sistem Kredit Semester (SKS) adalah sistem penyelenggaraan program pendidikan yang peserta didiknya menentukan sendiri beban belajar dan matapelajaran yang diikuti untuk setiap semester pada satuan pendidikan. SKS adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama satu semester melalui kegiatan terjadwal tatap muka, tugas terstruktur, dan tugas mandiri. Beban belajar adalah rumusan satuan waktu yang dibutuhkan oleh peserta didik dalam mengikuti program pembelajaran melalui sistem tatap muka, penugasan terstruktur, dan kegiatan mandiri tidak terstruktur untuk mencapai standar kompetensi lulusan serta kemampuan lainnya dengan memperhatikan tingkat perkembangan peserta didik. Semester adalah satuan waktu kegiatan belajar efektif, terdiri atas 16 minggu yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran efektif pada satuan pendidikan termasuk kegiatan penilaian. Kegiatan tatap muka adalah kegiatan pembelajaran yang berupa proses interaksi antara peserta didik, materi pembelajaran, pendidik, dan lingkungan. Penugasan terstruktur adalah kegiatan pembelajaran yang berupa pendalaman materi pembelajaran oleh peserta

didik yang didesain oleh pendidik untuk menunjang pencapaian tingkat kompetensi dan atau kemampuan lainnya pada kegiatan tatap muka. Waktu penyelesaian penugasan terstruktur ditentukan oleh pendidik. Penugasan terstruktur termasuk kegiatan perbaikan, pengayaan, dan percepatan. Kegiatan mandiri tidak terstruktur adalah kegiatan pembelajaran yang berupa pendalaman materi pembelajaran oleh peserta didik yang didesain oleh pendidik untuk menunjang pencapaian tingkat kompetensi mata pelajaran atau lintas mata pelajaran atau kemampuan lainnya yang waktu penyelesaiannya diatur sendiri oleh peserta didik.

Karakteristik Sistem Kredit Semester adalah (1) Dalam SKS, tiap mata kuliah diberi harga (bobot) yang namanya kredit. (2) Besarnya nilai kredit untuk mata kuliah yang berlainan tidak perlu sama. (3) Besarnya nilai kredit untuk masing-masing mata kuliah ditentukan atas besarnya usaha yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinyatakan dalam program tatap muka teori (TMT), praktikum/pelatihan (P), tugas lapangan/praktek kerja (PK). (4) Kegiatan yang disediakan terdiri atas kegiatan wajib dan kegiatan pilihan. Kegiatan wajib merupakan kegiatan yang harus diikuti semua peserta didik.

Kegiatan pilihan merupakan kegiatan yang disediakan untuk menjadi alternatif bagi upaya meningkatkan kompetensi peserta didik. (5) Dalam batas tertentu, peserta didik mendapatkan kebebasan untuk menentukan: banyaknya satuan kredit yang diambil untuk tiap semester, jenis kegiatan studi yang diambil untuk tiap-tiap semester, dan jangka waktu untuk menyelesaikan beban studi. (6) Banyaknya satuan kredit semester yang dapat diambil oleh peserta didik pada suatu semester ditentukan oleh indeks prestasi semester sebelumnya dan kemungkinan kondisi yang melatarbelakangi studi peserta didik (kecuali untuk semester awal harus sudah ditentukan).

Secara umum tujuan SKS adalah agar satuan pendidikan dapat menyajikan program pendidikan yang bervariasi dan fleksibel, untuk memberikan peluang kepada peserta didik untuk memilih program pembelajaran menuju pada suatu jenjang profesi tertentu. Secara khusus, tujuan penerapan SKS adalah untuk: (1) Memberikan kesempatan kepada para peserta didik yang cakap dan giat belajar, agar dapat menyelesaikan studi dalam waktu sesingkat mungkin. (2) Memberikan kesempatan kepada peserta didik agar dapat mengambil mata pelajaran sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya. (3)

Memberikan kemungkinan sistem pendidikan untuk mewujudkan keseimbangan antara *input* dan *output*. (4) Mempermudah penyesuaian kurikulum tingkat satuan pendidikan dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. (5) Memberikan kemungkinan agar sistem evaluasi kemajuan belajar peserta didik dapat diselenggarakan dengan baik. (6) Memungkinkan pengalihan kredit antar program keahlian dalam satu satuan pendidikan atau perpindahan (transfer) dari satuan jenis pendidikan ke jenis pendidikan lain melalui konversi. (7) Meningkatkan kemungkinan keterlaksanaan prinsip *multy entry* dan *multy exit*.

Manfaat Penerapan SKS adalah untuk (1) Menyesuaikan dengan kecepatan belajar setiap peserta didik, (2) Mempersingkat waktu penyelesaian studi bagi peserta didik yang berkemampuan dan berkemauan tinggi, (3) Peserta didik dapat mengembangkan potensi diri sesuai dengan kemampuannya, (4) Meningkatkan kemandirian peserta didik dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan belajar.

Alokasi waktu yang diperlukan per minggu per satu sks sebagai berikut:

1. Untuk mata kuliah teori (TMT=Tatap Muka Teori):

- a. Bagi peserta didik berarti:
- 1) 50 menit melaksanakan proses pembelajaran tatap muka.
  - 2) 60 menit penugasan terstruktur.
  - 3) 60 menit kegiatan mandiri.

- b. Bagi dosen berarti:
- 1) 50 menit melaksanakan proses pembelajaran tatap muka.
  - 2) 60 menit perencanaan dan penilaian hasil belajar.
  - 3) 60 menit pengembangan materi pembelajaran.

2. Untuk mata kuliah praktik (praktikum):

- a. Bagi peserta didik berarti:
- 100-150 menit kegiatan praktik di laboratorium atau praktik di bengkel atau studio atau di tempat olah raga di lapangan.

- b. Bagi dosen berarti:
- 1) 100-150 menit kegiatan pembelajaran dan penilaian di laboratorium/bengkel/studio.
  - 2) 50 menit pengembangan materi dan persiapan mengajar.

3. Untuk pelajaran praktik lapangan/Industri (PI), satu SKS berarti:

- a. Bagi peserta didik berarti:
- 1) 200-250 menit kegiatan



- praktik lapangan/industri.
- 2) 50 menit penugasan terstruktur.
- 3) 50 menit kerja mandiri.

Penentuan kemampuan kompetensi seorang peserta didik mempertimbangkan pengetahuan, sikap, dan ketrampilan. Penilaian kompetensi menggunakan berbagai pendekatan secara komplementatif, mencakup semua unsur hasil belajar. Kriteria ketuntasan minimal (KKM) setiap mata kuliah ditetapkan sesuai fungsi dan kedudukan mata kuliah dalam proses pembentukan standar kompetensi lulusan (SKL). Nilai suatu mata kuliah ditentukan dengan "standar sebelas" yaitu nilai 0 sampai dengan 10 atau "standar 101" dengan nilai 0 sampai dengan 100. Penilaian dalam sistem kredit semester dilakukan dengan menggunakan kriteria nilai (grade) sebagai berikut. A, B, C, D, dan E. Berdasarkan kriteria penilaian di atas ditentukan batas ambang ketuntasan minimal untuk seluruh mata kuliah. Mahasiswa yang belum mencapai nilai batas ambang ketuntasan minimal dinyatakan tidak lulus. Indeks Prestasi (IP) adalah nilai kredit rata-rata yang merupakan satuan nilai akhir, menggambarkan kadar kompetensi suatu hasil belajar. Untuk menentukan IP digunakan rumus jumlah

nilai huruf ditransfer ke nilai bobot x sks, dibagi jumlah sks. Nilai IPK semester sebelumnya akan menentukan jumlah sks maksimal yang dapat diambil oleh mahasiswa yang bersangkutan pada semester berikutnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

Indeks Prestasi (semester)	Beban Studi maksimal
Lebih dari 2,99	22
2,50 - 2,99	19
2,00 - 2,49	16
1,50 - 1,99	13
Kurang dari 1,50	10

Pola penyelenggaraan pendidikan dengan SKS dapat dilakukan untuk kurikulum berbasis kompetensi dengan melakukan beberapa penyesuaian penetapan konversi sks. Penilaian dalam kurikulum berbasis kompetensi tetap mengacu pada kriteria lulus dan tidak lulus kompetensi. Namun untuk lulus kompetensi ada gradasi nilai (*grade*) yaitu dari paling rendah C. Untuk status tidak lulus hanya dinyatakan dengan nilai D, D-, dan E. Pembulatan besarnya SKS hasil konversi bisa dilakukan dengan ketentuan hasil pecahan >0,5 dibulatkan ke atas dan yang <0,5 dibulatkan ke bawah.

## E. REVITALISASI SISTEM SKS DIAKPOL

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, revitalisasi berarti proses, cara, dan perbuatan menghidupkan kembali suatu hal yang sebelumnya kurang berdaya. Revitalisasi berarti menjadikan sesuatu atau perbuatan menjadi vital. Sedangkan kata vital mempunyai arti sangat penting atau perlu sekali (untuk kehidupan dan sebagainya). Atau lebih jelas revitalisasi itu adalah membangkitkan kembali vitalitas. Jadi, pengertian revitalisasi ini secara umum adalah usaha-usaha untuk menjadikan sesuatu itu menjadi penting dan perlu sekali.

Revitalisasi sistem SKS di Akpol mengandung makna bahwa pelaksanaan sistem SKS untuk mengimplementasikan kurikulum berbasis kompetensi di Akpol belum maksimal, masih mengandung kekurangan, masih ada kendala, masih belum berdaya guna sehingga perlu dihidupkan kembali atau diberdayakan kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk mengupas revitalisasi sistem SKS di Akpol perlu dibahas beberapa pola pelaksanaan program implementasi kurikulum berbasis kompetensi di Akpol, yakni program pembelajaran, pelatihan, dan pengasuhan.

### 1. Revitalisasi SKS dalam Program Pembelajaran

Proses pembelajaran yang banyak dipraktikkan di dalam kelas sebagian besar berbentuk penyampaian secara tatap muka (*lecturing*) dan cenderung searah. Pada saat mengikuti kuliah atau mendengarkan ceramah, mahasiswa/taruna akan kesulitan untuk mengikuti atau menangkap makna esensi materi pembelajaran, sehingga kegiatannya sebatas membuat catatan yang kebenarannya diragukan. Pola proses pembelajaran dosen aktif dengan mahasiswa pasif ini efektivitasnya rendah, dan tidak dapat menumbuhkan proses partisipasi aktif dalam pembelajaran. Keadaan ini terjadi sebagai akibat elemen-elemen terbentuknya proses partisipasi yang berupa, (i) dorongan untuk memperoleh harapan (*effort*), (ii) kemampuan mengikuti proses pembelajaran, dan (iii) peluang untuk mengungkapkan materi pembelajaran yang diperolehnya di dunia nyata/masyarakat tidak ada atau sangat terbatas. Intensitas pembelajaran mahasiswa umumnya meningkat (tetapi tetap tidak efektif), terjadi pada saat-saat akhir mendekati ujian. Akibatnya mutu materi dan proses pembelajaran sangat sulit untuk diases.

Dosen menjadi pusat peran dalam pencapaian hasil pembelajaran dan seakan-akan menjadi satu-satunya

sumber ilmu. Perbaikan pola pembelajaran ini telah banyak dilakukan dengan kombinasi *lecturing*, tanya-jawab, dan pemberian tugas, yang kesemuanya dilakukan berdasarkan "pengalaman mengajar" dosen yang bersangkutan dan bersifat *trial-error*. Luaran proses pembelajaran tetap tidak dapat diases, serta memerlukan waktu lama pelaksanaan perbaikannya. Pola pembelajaran di perguruan tinggi yang berlangsung saat sekarang perlu dikaji untuk dapat dipetakan pola keragamannya. Oleh karenanya perlu dilakukan perubahan dalam proses dan materi pembelajaran di perguruan tinggi tidak lagi berbentuk *Teacher-Centered Content-Oriented* (TCCO), tetapi diganti dengan menggunakan prinsip *Student-Centered Learning* (SCL) yang disesuaikan dengan keadaan perguruan tingginya.

Aktivitas belajar para mahasiswa/aruna pada umumnya terfokus pada saat proses belajar mengajar di kelas. Setelah itu, para mahasiswa/taruna pada umumnya menganggap pembelajaran telah selesai dan menunggu pertemuan berikutnya sesuai dengan jadwal tatap muka. Apalagi, belum banyak dosen/gadik yang memanfaatkan sistem SKS secara maksimal dalam praktik pembelajaran di Akpol. Beberapa yang mencoba menerapkan sistem SKS secara konsekuan dan taat azas

lebih banyak terbentur pada kondisi pengelolaan mahasiswa/taruna di luar jam pembelajaran tatap muka serta keberadaan sarana dan prasarana belajar terstruktur dan mandiri yang belum mendukung.

Program-program pembelajaran yang dikembangkan di dalam kelas oleh dosen/gadik pada umumnya terhenti pada kegiatan tatap muka selama waktu yang telah ditentukan, yakni 100 menit tatap muka untuk mata kuliah dengan bobot 2 SKS. Kalaupun ada dosen/gadik yang memberikan tugas kepada mahasiswa/taruna, tugas tersebut belum diperhitungkan benar bobot dan kebutuhan waktu untuk penyelesaiannya.

Idealnya, pelaksanaan sistem SKS untuk mata kuliah yang memiliki bobot 2 SKS, membutuhkan waktu 100 menit tatap muka sebagai bentuk perkuliahan yang menekankan pada prinsip *Student-Centered Learning* (SCL), 120 menit penyelesaian tugas terstruktur oleh mahasiswa/taruna di bawah kontrol langsung oleh dosen/gadik, serta 120 menit tugas mandiri yang harus dilakukan mahasiswa/taruna untuk menunjang dan memperdalam materi perkuliahan tatap muka. Kegiatan penyelesaian tugas terstruktur dan tugas mandiri tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penerapan sistem SKS di perguruan

tinggi.

Sementara itu, dosen/gadik selain memantau kegiatan pembelajaran mahasiswa/taruna pada kegiatan 100 menit tatap muka, 120 menit penyelesaian tugas terstruktur, dan 120 menit pelaksanaan tugas mandiri, juga memiliki kewajiban sesuai dengan beban SKS mata kuliah yang diampu. Dosen/gadik memiliki kewajiban menjalankan program pembelajaran tatap muka bersama mahasiswa/taruna selama 100 menit, merencanakan dan mengevaluasi pelaksanaan program pembelajaran tatap muka, tugas terstruktur, dan tugas mandiri sesuai bobot SKS yang diampu yakni 120 menit, serta mengembangkan dan memperkaya materi perkuliahan selama 120 menit. Dengan demikian, mahasiswa/taruna dan dosen/gadik sama-sama memiliki beban belajar sebagai konsekuensi dari penerapan sistem SKS.

Persoalannya adalah sudahkan mahasiswa/taruna Akpol mendapatkan beban belajar sesuai dengan sistem SKS tersebut? Sudahkan dosen/gadik Akpol melaksanakan tugas sebagaimana tuntutan sistem SKS tersebut? Bila hal tersebut dilakukan secara maksimal tentu kualitas pembelajaran di Akpol akan sangat baik. Bobot SKS setiap mata kuliah benar-benar dapat memberikan pengalaman belajar dan mem-

bekali kompetensi yang maksimal bagi mahasiswa/taruna.

Pengintegrasian program pembelajaran dan pengasuhan dalam merevitalisasi sistem SKS di Akpol memungkinkan program pembelajaran di Akpol berlangsung secara maksimal. Keterbatasan waktu dan tenaga para dosen/gadik untuk mengontrol pelaksanaan tugas terstruktur dan tugas mandiri pada mata kuliah yang diampunya dapat dibantu oleh para pengasuh yang memang memiliki tugas mendampingi para mahasiswa/taruna selama 24 jam penuh. Permasalahannya adalah: apakah sudah ada kerjasama antara dosen/gadik dengan para pengasuh dalam pelaksanaan program pembelajaran tatap muka di kelas (100 menit), program pembelajaran berupa tugas terstruktur di luar kelas (120 menit), dan program pembelajaran berupa tugas mandiri di luar kelas (120 menit)? Untuk itu, di awal semester atau pada waktu-waktu tertentu pada setiap minggu atau waktu-waktu lain yang bisa disepakati bersama, perlu dilaksanakan diskusi untuk menyamakan persepsi antara para dosen/gadik dengan para pengasuh.

Dosen/gadik dan para pengasuh perlu saling memahami dan saling membantu pelaksanaan program pembelajaran maupun program pengasuhan. Program pembelajaran

yang dikelola dengan sistem SKS sebagaimana memerlukan pembagian waktu belajar tatap muka, tugas terstruktur, dan tugas mandiri perlu disepakati dengan para pengasuh agar para pengasuh bisa memberikan bantuan untuk memaksimalkan program pembelajaran. Selain itu, para pengasuh juga dapat menyesuaikan program pengasuhan yang mendukung pencapaian program pembelajaran, agar program pembelajaran dan program pengasuhan bisa saling melengkapi dan mendukung upaya pembentukan mahasiswa/taruna. Adanya kesan bahwa program pembelajaran sering berbenturan dengan kegiatan pengasuhan pada mahasiswa/taruna Akpol akan berkurang.

Pengintegrasian program pembelajaran dan pengasuhan bagi mahasiswa/taruna Akpol akan memberikan peluang system SKS dilaksanakan secara murni dan konsekuen dan pada gilirannya kurikulum berbasis kompetensi benar-benar memberikan bekal kompetensi pada mahasiswa/taruna.

## 2. Revitalisasi SKS dalam Program Pelatihan

Sistem SKS perguruan tinggi untuk mata kuliah yang berupa praktikum, praktik kerja lapangan, penelitian lapangan, pelatihan, dan sejenisnya memiliki ketentuan yang

berbeda dengan sistem SKS pada program pembelajaran. Pada mata kuliah praktik, 1 SKS dimaknai sebagai 4 sampai 5 jam praktik. Ini berarti untuk mata kuliah praktik (pelatihan) yang berbobot 2 SKS memerlukan waktu 400 sampai 500 menit kegiatan lapangan yang diampu langsung oleh para instruktur.

Pengintegrasian program pelatihan dan pengasuhan semestinya tidak mengalami banyak kendala karena kedua program tersebut dilaksanakan di lapangan oleh instruktur dan pengasuh yang berasal dari internal Akpol dan tinggal di lingkungan Akpol. Instruktur dan pengasuh dapat berkoordinasi dalam pelaksanaan pelatihan dan pengasuhan sekaligus.

## 3. Revitalisasi Sistem SKS dalam Kegiatan Pengasuhan

Pengasuhan menjadi ciri utama sebuah lembaga pendidikan kedinan. Taruna Akpol dipersiapkan untuk menjadi perwira Polri yang bermoral, profesional, cerdas, dan modern. Pengasuhan menjadi program utama pembentukan karakter perwira kepolisian yang ideal yang memiliki kemampuan dalam aspek afektif, kognitif dan psikomotorik (sikap perilaku). Untuk mewujudkan terciptanya sosok Perwira Polri yang ideal, Akpol membangun sebuah

sistem pendidikan yang dilaksanakan melalui aspek kegiatan pembelajaran, pelatihan, dan pengasuhan (jarlatsuh).

Kegiatan pengasuhan diarahkan pada pembentukan sikap dan perilaku yang meliputi usaha pemberian bimbingan dan pembinaan dalam rangka menanamkan dan memantapkan perangkat nilai-nilai dasar yang bersumber pada Pancasila dan UUD 1945 serta Etika Profesi Kepolisian sebagaimana tercantum dalam Tri Brata dan didasari oleh prinsip kemitraan serta prinsip saling asah, asih dan asuh. Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Sistem Pendidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia, menjelaskan bahwa pengasuhan diartikan sebagai proses interaksi antara peserta didik dengan Gadikan pada satu lingkungan belajar untuk membentuk sikap, mental, moral, dan perilaku terpuji.

Pengasuhan pada Akademi Kepolisian merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Pengasuh dan Taruna Senior sesuai lingkup tugas dan tanggung jawabnya dalam bentuk pembinaan, bimbingan, dan pengawasan kepada taruna secara terencana dan konsisten untuk menjadikan taruna sebagai pribadi unggul, berilmu ilmiah, beramal amaliah, memiliki kompetensi sebagai anggota bhayangkara, memahami hak

asasi manusia yang tertuang dalam Pedoman Pengasuhan Taruna Akpol. Secara umum, pengasuhan memiliki tujuan untuk merubah, membentuk, menumbuhkembangkan, membulatkan, mematangkan, dan mendewasakan sikap perilaku taruna untuk menuju Perwira Polri yang ideal. Pelaksanaan kegiatan pengasuhan di Akpol dilakukan di luar kegiatan pembelajaran dan pelatihan.

Berkaitan dengan pengimplementasian kurikulum berbasis kompetensi dengan sistem SKS, perlu kiranya diintegrasikan kegiatan pembelajaran dengan kegiatan pengasuhan untuk memaksimalkan pelaksanaan pembelajaran yang menggunakan system SKS. Hal yang dapat dilakukan adalah memodifikasi program pengasuhan yang tergolong pada kegiatan bimbingan dan konsultasi.

Program bimbingan dan konsultasi akan menempatkan para pengasuh untuk dapat menjadi seorang konselor kepada para tarunanya. Pada kegiatan ini, Taruna dapat berkonsultasi mengenai berbagai hal yang dialami atau akan diikutinya seperti bimbingan masalah pelajaran, konsultasi permasalahan, dan sharing informasi. Kegiatan ini bersifat personal yang dilaksanakan oleh satu atau dua orang taruna kepada pengasuh baik pengasuh langsung maupun pengasuh tidak langsung.

Sehingga para taruna menjadi lebih paham mengenai hal-hal yang tidak dimengerti, ataupun mengurangi beban permasalahan yang sedang dihadapinya.

Dalam konteks pelaksanaan pembelajaran dengan system SKS, ada dua kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan di luar jam pertemuan tatap muka, yakni tugas terstruktur dan tugas mandiri.

Para pengasuh dapat memaksimalkan kegiatan pengasuhannya untuk membantu pelaksanaan sistem SKS secara maksimal, yakni dengan memberikan bimbingan dan pendampingan bagi taruna dalam melaksanakan tugas terstruktur dan tugas mandiri yang diberikan oleh para dosen/gadik setiap mata kuliah. Pemberian bimbingan, pendampingan, dan pengawasan pelaksanaan tugas terstruktur dan mandiri tersebut disesuaikan dengan bobot SKS masing-masing mata kuliah. Selain itu, para pengasuh juga perlu menyesuaikan beban belajar taruna dalam melaksanakan pembelajaran, pelatihan, dan pengasuhan. Hal ini penting agar tidak terjadi *over dosis* dalam pelaksanaan salah satu program kegiatan yang dapat mengakibatkan terganggunya program lain.

Pengawasan terhadap kegiatan wajib belajar pada malam hari dimaksimalkan untuk mendalaman penguasaan materi pembelajaran

sebagai bentuk tugas mandiri. Wajib belajar dapat digunakan taruna untuk mengulas pelajaran yang baru didapat pada saat perkuliahan dihari tersebut, maupaun mempersiapkan bahan perkuliahan keesokan harinya disertai pengerjaan tugas-tugas perkuliahan yang diberikan oleh dosen/gadik.

Kehadiran pengasuh pada kegiatan wajib belajar ini sangat berguna ketika taruna yang mengalami kesulitan dalam hal memahami bahan pelajaran yang dialaminya. Pengasuh berkewajiban untuk memberikan pencerahan dan bimbingan kepada taruna yang memiliki nilai akademis kurang.

## F. PENUTUP

### 1. Simpulan

Kompetensi diartikan sebagai seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang taruna sebagai syarat melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaannya. Pendidikan harus menghasilkan kemampuan bertindak yang benar & cerdas; tindakan yang produktif, yang efektif, yang mampu memecahkan masalah nyata dalam kehidupan. Kompetensi berkaitan dengan kemampuan bertindak yang cerdas.

Komponen kurikulum adalah unsur-unsur penting yang harus dimiliki oleh kurikulum yang

merupakan kesatuan sistem dan tidak terpisah satu dengan yang lainnya dan saling melengkapi. Komponen-komponen tersebut adalah tujuan, isi, aktivitas belajar, dan evaluasi. Implementasi kurikulum berbasis kompetensi akan bermuara pada pembelajaran sehingga untuk melihat implementasi KBK di Akpol perlu diperhatikan pelaksanaan program pembelajaran, pelatihan, dan pengasuhan. Sebagai sebuah sistem pendidikan, pembelajaran, pelatihan, dan pengasuhan di Akpol perlu dilakukan secara terintegrasi untuk memaksimalkan pelaksanaan masing-masing program. Pelaksanaan pembelajaran, pelatihan, dan pengasuhan perlu memperhatikan ketentuan minimal pelaksanaan sistem kredit semester (SKS).

Pengintegrasian program pembelajaran, pelatihan, dan pengasuhan perlu memperhatikan ketentuan pelaksanaan sistem SKS. Sistem SKS di Akpol memungkinkan program pembelajaran, pelatihan, dan pengasuhan berlangsung secara maksimal. Keterbatasan waktu dan tenaga para dosen/gadik untuk mengontrol pelaksanaan tugas

terstruktur dan tugas mandiri pada mata kuliah yang diampunya dapat dibantu oleh para pengasuh yang memiliki tugas mendampingi para mahasiswa/taruna selama 24 jam penuh. Dengan demikian, perlu ada penyesuaian program pembelajaran, pelatihan, dan pengasuhan agar terjadi saling melengkapi dan memperkuat.

## 2. Saran

Berdasarkan simpulan tersebut, disampaikan beberapa saran sebagai berikut. (1) Untuk memaksimalkan pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi di Akpol perlu dilakukan integrasi program pembelajaran, pelatihan, dan pengasuhan, (2) Untuk memaksimalkan pencapaian program pembelajaran, pelatihan, dan pengasuhan di Akpol, pelaksanaan sistem SKS agar dimaksimalkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, (3) para dosen/gadik, instruktur, dan pengasuh hendaknya menyamakan visi, misi, dan program kegiatan di bawah koordinasi pimpinan Akpol sehingga perbenturan program kegiatan dapat dihindari.



### Daftar Pustaka

- Adiwijaya, ZA. 2009. "Paradigma Baru Perguruan Tinggi". *Suara Merdeka.Com*. <http://www.suaramerdeka.com/harian/0509/19/opi4.htm>.
- Brady, Laurie.1992. *Curriculum Development (Thirfd Edition)*. Australia: Prentice Hall.
- Diknas. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.Jakarta. Balai Pustaka Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Hamalik, Oemar 2006. *Manajemen Implementasi Kurikulum: Bagi Pengembang, Pengelola dan Pengawas*. Bandung: SPS UPI.
- Hasan, Said Hamid. 2004. *Pengembangan Kurikulum Cenderung Tidak Menguntungkan*. <http://www.kapanlagi.com>
- Kelly, A.V 2004. *The Curriculum Theory and Practice Fifth Edition*. London: Sage Publications.
- Miller,J.P & Siller,W.1985. *Curriculum:Perspectives And Practices*.New York: American Book Co.
- Nasution. 2006. *Kurikulum dan Pengajaran*. Jakarta: PT Bina Aksara.
- Print, Murray. 1993. *Curriculum Development and Design*. Australia: Allen & Unwin.
- Rozali. 2008. "Implementasi Mata Pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Studi Kasus di MAN Padusunan Kota Pariaman". *Tesis*. PPS UPI Bandung: Tidak Diterbitkan.
- Sanjaya,Wina. 2007. *Kurikulum dan Pembelajaran*. Bandung: Sekolah Pascasarjana
- Siraj, Saedah. 2008. *Kurikulum Masa Depan*. Kuala Lumpur: Universiti Malaya.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. 2004. *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktik*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Tyler, R.W.1949. *Basic Principles of Curriculum and Instructions*. Cicago: University of Chicago Press.
- Zais, Robert S. 1976. *Curriculum Principles and Foundation*. London: Harper and Row.